

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MANADO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA BANJIR

Biyan Anugrah Awusi¹

Herman Nayoan²

Jones Tompodung³

Abstrak

Pada awal tahun 2014 terjadi banjir bandang di Manado yang disebabkan hilangnya hutan dan sungai-sungai kecil di sekitar Manado, serta rusaknya daerah resapan akibat pembangunan kota yang serampangan menyebabkan sejumlah sungai di Manado tak mampu lagi menahan debit air hujan. Dampak dari banjir bandang ini menyebabkan puluhan ribu orang menjadi korban dan melakukan pengungsian, serta mengakibatkan puluhan rumah mengalami kerusakan. Selain itu banjir juga menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasarana di wilayah yang terkena bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam Upaya Menanggulangi Korban Bencana Banjir. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Manado dalam pencapaiannya sebesar 70 % dari yang diharapkan. Hal ini di dapat berdasarkan pada hasil penghitungan perbandingan antara jumlah data yang terkumpul. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang belum dapat sepenuhnya teratasi. Diantaranya permasalahan terkait dengan alat/sarana yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil penghitungan data tingkat kinerja indikator alat/sarana yaitu didapatkan hasil sebesar 65 %. Ini menggambarkan bahwa tingkat persetujuannya masih rendah dari yang diharapkan 65 % yang menunjukan bahwa masih minimnya alat/sarana penanggulangan bencana banjir. Ditambah pula dengan keterbatasan sumber daya manusia yang professional di bidang kebencanaan khususnya dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Manado.

Kata Kunci: Kinerja, Penanggulangan, Banjir, BPBD.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volome 1 No. 1 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

Pendahuluan

Salah satu fenomena alam yang menimbulkan kerugian besar yang selalu mengancam beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berbagai peristiwa banjir pada tahun 2012 sampai akhir 2016 jumlah bencana banjir telah terjadi 3.140 kali, ini menunjukan bahwa Indonesia rawan akan bencana banjir.

Banjir merupakan genangan air dalam jumlah besar yang biasanya disebabkan oleh meluapnya air sungai karena debit air yang melebihi daya tampungnya. Banjir melanda hampir di setiap musim penghujan. Banyak faktor yang menyebabkan suatu daerah terkena banjir, antara lain bentuk Daerah Aliran Sungai (DAS), gradien sungai, kerapatan drainase, lereng rata-rata DAS dan penggunaan lahan. Parameter tersebut bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kerentanan potensi banjir di suatu daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana. BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) dari Undang - Undang yang sama menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri. Pasal 18 di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya. BPBD Kota Manado dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2009 yang di kelompokan dalam Lembaga Teknis Daerah, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan

pencegahan dan penanggulangan bencana daerah.

Dari tahun ke tahun sampai awal tahun 2017 beberapa wilayah di kota Manado sangat rentan terjadi banjir bila sudah memasuki musim hujan walaupun dampaknya tidak separah seperti awal tahun 2014, tetapi setidaknya ada suatu upaya dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang perlu dilakukan untuk pengurangan resiko bencana itu sendiri. BPBD dapat melibatkan seluruh instansi serta menaungi instansi-instansi yang turut andil dalam penanggulangan bencana seperti PMI, SAR, TNI, POLRI, PRAMUKA, dan lain lain, sehingga manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lancar karena adanya kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang baik.

Tinjauan Pustaka

(Tangkilisan, 2006:178) Kinerja adalah susatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimiliki yang dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas

Soekidjo Notoatmodjo (2009:124) mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengertian kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang di harapkan.

Menurut Anwar Prabu Mengkunegara (2009:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengertian kinerja menurut Moheriono (2012:95) yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volome 1 No. 1 Tahun 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Abdullah, 2014:3).

Menurut Prawirosentono (2008:176) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Serdamayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Rivai (dalam Muhammad Sandy, 2015:12) memberikan pengertian bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.

Pengertian kinerja menurut Stephen Robbins yang diterjemahkan oleh Harbani Pasolong Kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Pasolong, 2017:176). Wirawan (2009:5) menyebutkan bahwa kinerja merupakan singkatan dari kinetika energy kerja yang padanannya dalam Bahasa Inggris adalah performance. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau

indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.

Bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dibagi dalam tiga macam bentuk bencana. Pertama, bencana alam yaitu yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, angin puting beliung dan banjir. Kedua, bencana yang disebabkan oleh faktor non alam seperti gagal teknologi, keracunan atau polusi zat kimia. Dan ketiga, bencana sosial yaitu bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia seperti konflik sosial. Pengertian bencana ini harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang kebencanaan. Karena menjadi patokan dalam menentukan suatu kondisi atau kejadian termasuk bencana atau bukan bencana. Perbedaan dalam memahami konsep akan berdampak pada implementasi dilapangan. Munculnya permasalahan seperti kurang koordinasi dan tumpang tindih program.

Penanggulangan bencana dilakukan dengan prinsip-prinsip cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan Akuntabilitas, Kemitraan; Pemberdayaan, Nondiskriminatif, dan Nonproletisi. Yang menjadi tujuan dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu; memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, menghargai budaya lokal,

membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: pengurangan risiko bencana dan pemanfaatan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. BNPB bertugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana .

BNPB dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana menetapkan 3 (tiga) tahap yaitu yang meliputi: prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penyelenggaraan pra bencana antara lain perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko bencana, pencegahan, pendidikan dan pelatihan . Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat

terkena bencana,Sedangkan penyelenggaraan pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

Definisi Bencana (Disaster) Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia definisi bencana adalah peristiwa/kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuanluar biasa dari pihak luar.Pengertian bencana atau disaster menurut Wikipedia: “disaster is the impact of a natural or man-made hazards that negatively effects society or environment” (bencana adalah pengaruh alam atauancaman yang dibuat manusia yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan). Pengertiandan beberapa istilah terkait dengan bencana.Bencana adalah peristiwa atau masyarakat rangkaian peristiwa yang mengancam danmengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis Sementara Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) mendefinisikan bencana dalam formulasi “The serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using their own resources” (Abarquez & Murshed, 2004).

Definisi bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar dari “Disaster Fenomena“, yaitu:

- Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard).
- Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan,

- penghidupan, dan fungsi dari masyarakat.
- Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard) dan kerentanan (vulnerability) masyarakat. Bila terjadi hazard, tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu, sementara bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi H, 1983).

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, maka penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Menurut Moleong (2005:90) penelitian kualitatif yaitu : "Suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara menyeluruh. Dalam hal ini mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kota Manado.

Dari penjelasan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas layanan,

responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi BPBD

1. Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya organisasi diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal dalam aspek
 - Sasaran
 - Tujuan
 - Visi
 - Misi organisasi

Yang di tuangkan melalui perencanaan suatu organisasi (BPBD)

2. Kualitas layanan yaitu pengamatan mengenai layanan BPBD pada masyarakat di tempat terjadinya bencana banjir atau tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan penempatan BPBD menjalankan tugasnya

3. Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Responsibilitas (tanggung jawab) adalah tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani (masyarakat) dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Akuntabilitas yaitu dengan melihat pertanggung jawaban pengelolaan keuangan berdasarkan tugas,misi,pemenuhan kebutuhan yang ada serta transparansi menejemen data keuangan yang masuk dan keluar.

BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan Staf Logistik dan Sekretaris Desa sebagai Tokoh

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volome 1 No. 1 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

Masyarakat, di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Sumber Data ada dua jenis yaitu: sumber Data Primer yaitu Sumber data Penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut :

- a. Key informan (Informasi Kunci) nya yaitu Kepala Pelaksana BPBD.
- b. Informannya yaitu Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Staf Logistik yang diteliti dilakukan secara Purposive sampling. Menurut Sugiyono, (2004:60). Purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal.
- c. Informan lainnya yaitu Sekretaris Desa sebagai Tokoh Masyarakat, yang dilakukan secara Purposive sampling, dimana menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal.

Hasil Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado akan terus berupaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terhadap berbagai target yang tidak tercapai di tahun lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

- a. Sampai dengan Desember 2017 realisasi dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dicapai adalah 70, sama dengan nilai target BPBD sebesar 70 maka diperoleh persentase pencapaian kinerja 100%. PD BPBD telah melaksanakan tugas

sesuai dengan peran dan fungsinya di pemerintahan maupun di tengah masyarakat.

- b. Realisasi dari ASN yang berkinerja baik PD BPBD di capai 90% sama dengan persentase pencapaian target PD BPBD sebesar 90% maka pencapaian kinerja 100%, yang berarti tercapai target yang di tetapkan. Setiap ASN dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah menyelesaikan kerjanya dengan penilaian kinerja baik.
- c. Realisasi temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti mencapai 100% sama dengan persentase target PD BPBD sebesar 100% maka diperoleh pencapaian kinerja 100%. Ada beberapa temuan BPK/Inspektorat yang menyebabkan TGR tetapi semuanya telah dipenuhi/dibayar ke kas daerah kota Manado oleh pihak yang tersangkut TGR.

Presentase Tingkat Capaian PD BPBD

- a. Realisasj/fedeks Resiko Bencana PD BPBD yang-diüapai menunjuk pada angka CsOi[^]Angka ini sama dengan target\130,4) maka diperoleh pencapaian kinerja 100%. Bencana alam yangHegaüi di tahun 2017 banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim. Bencana yang terjadi tidak terbendung tetapi akibat dari bencana tersebut dapat diatasi.
- b. Persentase Jselurahan yang memiliki Sistem MitigasL[^]-Bencana ditargetkan (63%) Tahun 2017 telah tercapai realisasi (63% ymaka diperoleh persentase pencapaian kinerja 100%. Persentase 100% berhasil dicapai sebab telah dilakukan kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana di kelurahan-kelurahan yang terdampak bencana.
- c. Persentase Kelurahan yang rajEan banjir dan tanah longsor targetnya (63%) Realisasinya mencapai &3%)

Banyak kejadian banjir dan tanah longsor selama tahun 2017 bantuan terhadap masyarakat di semua kelurahan terdampak telah disalurkan. Kinerja mencapai 100%.

d. Persentase daerah bencana yang telah di rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana banjir dan tanah longsor ditargetkan 30%, realisasinya 30%. Tahun 2017 BPBD telah melaksanakan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana kepada masyarakat dengan kondisi rumah rusak. Persentase kinerja mencapai 100%.

Penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah ketersediaan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya dengan kondisi sebagian dalam keadaan baik dan sebagian dalam keadaan kurang baik.

- Menguraikan secara singkat mengenai Rencana Stxatejik dan Rencana
- Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi analisis akuntabilitas kinerja termasuk keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah atisipatif yang diambil dan akuntabilitas keuangan.
- Menguraikan tinjauan umum dan khusus tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan dan wawancara serta data yang di peroleh maka dapat diketahui "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota manado tercapai 70 % dari

maksimal 80 %. Dari setiap data yang di peroleh dari warga sekitar dan juga yang berasal dari dinas BPBD permasalahan bukan hanya di dapat dari BPBD atau dari setiap keanggotaan perbidang di BPBD, akan tetapi di dapat juga dari masyarakat yang tidak sesuai dengan ekspetasi di visi BPBD.

BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Manado dalam pencapaiannya sebesar 70 % dari yang diharapkan. Hal ini di dapat berdasarkan pada hasil penghitungan perbandingan antara jumlah data yang terkumpul. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang belum dapat sepenuhnya teratasi. Diantaranya permasalahan terkait dengan alat/sarana yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil penghitungan data tingkat kinerja indikator alat/sarana yaitu didapatkan hasil sebesar 65 %. Ini menggambarkan bahwa tingkat persetujuannya masih rendah dari yang diharapkan 65 % yang menunjukan bahwa masih minimnya alat/sarana penanggulangan bencana banjir. Ditambah pula dengan keterbatasan sumber daya manusia yang professional di bidang kebencanaan khususnya dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Manado.

Faktor – faktor :

- Produktifitas

di liat dari setiap aspek atau program yaitu sasaran,tujuan,visi,Misi Organisasi sudah berjalan dengan baik di terima dari laporan wawancara masyarakat di tempat rawan banjir,tetapi masih sering terkadang aspek tujuan dan misi tidak berjalan dengan baik karena tidak ada dukungan juga dari masyarakat untuk mendukung BPBD dalam menjalankan tugas, harapanya harus ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan dari pihak BPBD.

- Kualitas Layanan

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volome 1 No. 1 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

Kualitas layanan sudah berjalan dengan baik juga,meskipun kadang kala dari masyarakat kadang kala tidak mersponi dengan baik setiap solusi yang di berikan pemerintah seperti rumah yang di sediakan sampai saat ini belum di huni.

- Responsivitas

Masih belum optimal,hal ini di katakana olah salah satu warga tanjung batu yaitu bapak Christian Mokoginta,olah karena banyaknya juga permintaan dari tempat-tempat yang rawan terjadinya banjir,yang di liat dari skala prioritas.

- Responsibilitas

Untuk daya tanggap dari setiap bidang sudah berjalan dengan baik,hanya saja di batasi oleh keadaan kota yang begitu susah akses ketika memberikan bantuan saat banjir terjadi

- Akuntabilitas

Untuk setiap anggaran yang di keluarkan,telah di laksanakan wawancara kepada sekretaris BPBD,anggaran ini bersifat transparansi,dan hanya di kelola untuk kebutuhan BPBD dan tempat yang memerlukan di liat dari skala prioritas.

Dan semua keperluan harus di daftar dan harus siap sedia,tidak ada terjadi penyimpangan.

Jadi pada dasarnya tenaga kerja dari setiap bidang di BPBD sudah mengoptimalkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan,tetapi dibatasi oleh setiap ruang gerak,ketersediaan tenaga bantuan yang kurang memadai,dan fasilitas yang di butuhkan. sampai saat ini pun juga dari BPBD masih dalam tahap mengembangkan dalam kestrukturran, perkantoran, badministrasi, terutama dari setiap program yang ada dan kebutuhan staf keanggotaan.

Saran

1. Alat/sarana dalam penanggulangan bencana banjir harus ditambah dan dilengkapi. Pasalnya wilayah Kota Manado yang tersebar di beberapa Kelurahan, Kecamatan rawan akan bencana banjir tiap tahunnya. Sehingga membutuhkan alat/sarana yang lebih lengkap agar proses penyelenggaraan bencana banjir dapat diatasi dengan baik.
2. Aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditambah dan ditingkatkan kompetensinya. Sehingga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir dapat dilaksanakan dengan profesional.
3. Benar-benar berupaya dalam menekankan visi terhadap masyarakat untuk menjadikan mereka masyarakat yang tanggap dan tangguh akan bencana,serta menjadikan mereka bisa melihat bahwa masyarakat sangat berperan penting dalam menghadapi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
- Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Muhammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: FE UGM
- Mangkunegara, Prabu Anwar. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu 2006. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Refika Aditama
- Miles, Matthew dan Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru). Jakarta: UI Press

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volome 1 No. 1 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

- Moeheriono. 2012 Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: RajaGrafindo
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.nggulangan bencana
- Nurjanah, dkk. 2013. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE
- Prawirosentono. 2008. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPFE
- Rivai. 2015. Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Serdamyanti. 2009. Tata Kerja Dan Produktifitas Kerja. Jakarta : Mandar Maju
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: FE UI
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Sobandi, Baban. 2006. Desentralisasi dan Tuntunan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung: Humaniora
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Admninistrasi. Bandung: Alfabeta
- Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2006. Manajemen Publik. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2012. Penelitian Kualitatif Sebuah Pengantar. Bandung: Alfabeta
- Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta: RajaGarafindo Persada
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. <http://bpbd.sulutprov.go.id>